

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Panca Kusuma

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

ABSTRACT

The purpose of the study to determine the Labor Force Participation Rate (LFPR) of the province of West Nusa Tenggara . The methodology used in preparing the 2011-2013 Regional Workforce Planning is to use the method of counting inventory and labor requirements by the Minister of Manpower and Transmigration No.PER.24/MEN/XII/2008 . Where the employment involves estimating a number of parameters of statistical analysis

The results showed that female LFPR developments tend to be lower than their male counterparts . LFPR of women influenced the development of their multiple roles in the household and their commitment to be active in the labor market . Women tend to be out of the labor market when the time of marriage , childbirth and child rearing and then back to the world of work when the kids are great . Besides the opening of educational opportunities for women in various fields will be followed by the increasing participation of women in the workforce.

LFPR maximum SD educated tend to be higher than the LFPR educated junior high . This indicates that the population of primary school age who are not working Workforce Planning West Nusa Tenggara Province 2011-2013 35 Department of Manpower and Transmigration , West Nusa Tenggara able to attend school tend to go into the world of work , thereby increasing the number of labor force . They tried to find a job and work because it does not have any special skills that can be offered when seeking employment . However , the existence of government programs 9-year compulsory elementary education LFPR able to reduce the original 70.61 percent in 2008 fell to 67.17 percent in 2010

Keywords : Labor Force Participation Rate , Labor Force West Nusa Tenggara Province

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis NTB terletak antara 08° 10'-09° 05' Lintang Selatan 115° 46'-119° 05'. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur terhadang Selat Sape, di sebelah Selatan terbentang Samudera Hindia dan di sebelah Barat berhadapan dengan Selat Lombok. NTB merupakan provinsi kepulauan dengan dua pulau utama: Lombok dan Sumbawa. Terdapat pula sekurangnya 332 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai yang terbentang seluas 2.333 kilometer. Dari 332 pulau-pulau kecil tersebut, sekitar 282 pulau diantaranya telah memiliki nama.

Luas daratan NTB terbentang sepanjang lebih dari 20 ribu kilometer persegi. Sementara luas perairan lautnya terhampar hampir 30 ribu kilometer persegi. Luas daratan pulau Lombok hampir mencapai 5 ribu kilometer persegi. Ini sekitar 23,51 persen dari luas total daratan NTB. Sementara daratan Pulau Sumbawa terbentang hingga 15 ribu kilometer persegi atau hampir mencapai 77 persen dari luas total daratan NTB. Luas daratan Pulau Sumbawa hampir empat kali luas daratan pulau

Lombok. Di NTB terdapat delapan kabupaten dan dua kota, dengan 116 kecamatan dan 910 desa atau kelurahan. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten terbaru yang terbentuk pada awal 2009.

Dilihat dari letak geografisnya, NTB mempunyai posisi strategis karena sejumlah alasan. Pertama, NTB berada pada jalur lintas transional Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis menguntungkan. Kedua, NTB terapat dua alur pelayaran Internasional yaitu alur pelayaran Selat Lombok dan alur pelayaran Selat Timor. Ketiga, NTB berada tepat pada hitungan tujuan wisata dunia : Bali-Komodo dan tana Toraja yang sering juga disebut “segitiga emas pariwisata Indonesia Kependudukan, Sosial dan Budaya

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk NTB pada Tahun 2008 berjumlah 4.363.756 jiwa. Kepadatan rata-ratanya 216,52 jiwa perkilometer persegi. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,29 persen per tahun. Dan pada tahun 2010 penduduk NTB mencapai 4.500.212 jiwa. Kepadatan Rata-rata 223,30 jiwa perkilometer persegi. Pada tahun 2008 terpampang fakta mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tingkat pendidikannya rendah. Berpendidikan SD sebesar 62,21 persen. SLTP sebesar 16,50 persen. Fakta lainnya penduduk usia produktif yang sejak 2004 bekerja pada sektor pertanian, pelan-pelan mulai bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Sekalipun demikian, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 47.41 persen atau setara dengan 924.975 jiwa, kemudian sektor perdagangan menyerap angkatan kerja 17,95 persen atau 350.279 jiwa, lalu sektor jasa 11,13 persen atau 217.239 jiwa dan sektor industri 10,01 persen atau 195.357 jiwa. Sisanya 13,5 persen atau 263.332 jiwa bekerja pada sektor lainnya.

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2006 dan 2007, menempatkan NTB sebagai daerah yang nilai pembangunan manusianya berada pada level menengah bawah, skornya dibawah 66. Memang dari waktu ke waktu, skor Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2013 20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

IPM NTB mengalami peningkatan. Hanya saja peningkatannya tidak cukup signifikan. Pada tahun 2004 skor IPM NTB 50,6 sedangkan pada tahun 2006 skornya naik menjadi 53. Dengan skor ini pada tahun 2004 peringkat IPM NTB berada pada rangking 33 dari 33 Provinsi kemudian pada tahun 2006 naik satu tingkat menjadi rangking 32. Sebuah peningkatan yang tidak terlaui membanggakan. Bahkan pada tahun 2007, rangking IPM NTB stagnan tetap pada peringkat 32. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota selama periode tahun 2004-2007, IPM tertinggi selalu digenggam Kota Mataram dengan nilai diatas rata-rata nilai IPM NTB secara keseluruhan. Berdasarkan kriteria UNDP, hanya Kota Mataram yang masuk kategori "menengah atas" dengan skor 69,8. Kabupaten-kota lainnya di NTB masuk kategori "menengah bawah" karena skornya hanya berkisar 50-65 saja. Melihat deretan fakta ini, jika ingin NTB berdiri sama tinggi dengan daerah lainnya, diperlukan percepatan, inovasi dan nilai tambah dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota harus mulai membangun kemitraan strategis, menyamakan visi dan misi serta melakukan investasi sosial-ekonomi secara lebih proporsional dalam membangun manusia.

Dilihat dari Angka melek huruf penduduk kelompok umur 10 tahun keatas dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Secara umum dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai angka 90 persen, angka melek huruf di NTB masih terbilang rendah. Dibandingkan provinsi lainnya, angka melek huruf NTB hampir berada paling bawah, hanya satu tingkat lebih baik dibandingkan dengan provinsi Papua

Dilihat dari bidang ketenagakerjaan, maka Jumlah penduduk NTB yang bekerja pada tahun 2008 mencapai 1.904.781 jiwa. Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja terbesar. sektor ini umumnya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Lebih banyak melibatkan pekerja tradisional atau marjinal (buruh tani) dengan tingkat upah yang rendah. Pada 2008 terdapat sekurangnya 124.300 penduduk NTB (6,13 persen) yang menganggur. Termasuk didalamnya angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau biasa disebut "penganggur terbuka". Ada kecenderungan kesenjangan yang semakin besar antara angkatan kerja baru dengan penyerapan tenaga kerja. Rendahnya daya saing dan jiwa kewirausahaan berakibat pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Sejauhmana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Barat

II. TINJAUAN TIORITIS

2.1. Pengertian Dasar, Konsep, dan Definisi

1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Kebutuhan Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya).
3. Persediaan Tenaga Kerja
Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (labour force) yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.
4. Penduduk Usia Kerja (PUK)
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
5. Angkatan Kerja (AK)
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
6. Bekerja
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
7. Penganggur Terbuka (PT)
Penganggur Terbuka terdiri dari :
 - a. Mereka yang mencari pekerjaan
 - b. Mereka yang mempersiapkan usaha
 - c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan

- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
8. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
Tingkat Penganggur Terbuka merupakan rasio jumlah Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.
9. Setengah Penganggur
Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu
10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antarajumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.
11. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha
Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia(KBLUI).
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - a. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun).
 - b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

III. METODE PENELITIAN DAN SUMBER DATA

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2011-2013 ini adalah dengan menggunakan metode penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.24/MEN/XII/2008. Dimana dalam memperkirakan sejumlah parameter ketenagakerjaannya melibatkan analisis statistika.

3.2. Sumber Data

Data kependudukan dan statistik ketenagakerjaan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi hasil survei yang telah dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: sakernas, susenas, supas dan sensus. Data upah bersumber dari data statistik pengupahan nasional yang telah dipublikasi BPS. Selain data kependudukan dan ketenagakerjaan, penelitian ini juga menggunakan beberapa data keuangan dan moneter sumber SEKI Bank Indonesia, CEIC, dan beberapa publikasi internasional terutama untuk data harga minyak.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2008 sebesar 67,69 persen, sementara TPAK tahun 2009 dan 2010 mencapai 68,66 persen dan 66,63 persen. TPAK provinsi NTB setiap tahunnya secara umum cenderung meningkat. TPAK ini menggambarkan tingkat keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi dalam bentuk bekerja dan mencari pekerjaan. Oleh karenanya peningkatan TPAK tersebut, salah satunya disebabkan oleh positifnya pertumbuhan perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif di setiap sektor atau lapangan usaha. Pola perkembangan TPAK sangat dipengaruhi oleh susunan umur dan jenis kelamin. TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK penduduk perempuan setiap tahunnya. Hal ini Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara

Barat 2011-2013 32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi tanggung jawab penduduk laki-laki yang pada akhirnya menjadi kepala rumah tangga.

4.1.1. TPAK Menurut Jenis Kelamin

Kondisi ketenagakerjaan TPAK cenderung membaik. Data sakernas tahun 2008-2010 menunjukkan peningkatan untuk TPAK perempuan semula sebesar 55,88 persen pada tahun 2008, selanjutnya meningkat menjadi 56,38 persen pada tahun 2009 dan menurun menjadi 53,46 persen pada tahun 2010. Sementara untuk TPAK laki-laki mengalami peningkatan semula 81,15 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 82,62 persen dan mengalami penurunan menjadi 81,16 persen pada tahun 2010.

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi NTB, Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Jenis Kelamin	2008	2009	2010
Laki-Laki	81,15	82,62	81,16
Perempuan	55,88	56,38	53,46
Jumlah	67,69	68,66	66,63

Sumber : BPS Prov.NTB

Perkembangan TPAK perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Perkembangan TPAK perempuan dipengaruhi peran ganda mereka dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak dan kemudian kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah besar. Selain itu semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan di berbagai bidang akan diikuti oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

4.1.2. TPAK Menurut Golongan Umur

TPAK untuk golongan umur 15-19 tahun cenderung terus menurun selama tahun 2008-2010, semula 37,83 persen pada tahun 2008 menurun menjadi 33,83 persen pada tahun 2010. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2013 33 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurunnya TPAK golongan umur 15-19 tahun tersebut salah satunya disebabkan oleh karena adanya perubahan sistem pendidikan yakni melalui program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun disatu sisi, sedangkan disisi lain semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap melambatnya laju pertumbuhan angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun. Sehubungan dengan itu, maka pertambahan jumlah angkatan kerja untuk golongan umur 15-19 tahun tersebut pada tahun-tahun berikutnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja-nya.

Perkembangan TPAK untuk golongan umur 20 tahun keatas kecenderungannya berfluktuasi. Pada golongan umur antara 40-44 tahun dan 45-49 tahun mencapai nilai TPAK tertinggi. Lebih lanjut, apabila dilihat per golongan umur menunjukkan TPAK golongan umur 20-59 tahun lebih besar dibandingkan dengan TPAK total. Data ini menggambarkan bahwa golongan umur antara 20-59 tahun merupakan usia yang produktif dan merupakan usia persyaratan dalam bekerja yang mempunyai hubungan kerja atau berstatus formal. Sementara untuk golongan umur 15-19 tahun, masih merupakan usia sekolah sehingga TPAK pada golongan umur tersebut diarahkan untuk selalu menurun. Untuk TPAK golongan umur 60 tahun keatas cenderung menurun, namun nilainya menggambarkan hampir separuh jumlah penduduk usia tersebut

masih aktif di dunia kerja. Aktifnya golongan umur tersebut, sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan kesejahteraan sehingga mereka memutuskan masih di kelompok angkatan kerja

Tabel 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi NTB, Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Golongan Umur	2008	2009	2010
15 – 19	37,83	37,92	33,83
20 – 24	67,92	68,28	61,03
25 – 29	72,68	74,02	72,04
30 – 34	78,03	79,51	76,90
35 – 39	77,87	82,83	78,15
40 – 44	82,58	81,95	82,39
45 – 49	83,62	82,88	82,12
50 – 54	79,73	81,14	80,71
55 – 59	72,56	75,70	74,48
60 +	52,22	51,49	50,55
Jumlah	67,69	68,66	66,63

Sumber : BPS Prov.NTB

4.1.3. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan

Data pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi partisipasinya di pasar kerja.

Tabel 4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi, NTB, Tahun 2008-2010 (Dalam Persen)

Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010
Maksimum SD	70,61	70,57	67,17
SLTP	54,11	56,25	55,69
SLTA	68,90	70,57	70,06
Diploma	88,75	88,97	88,53
Universitas	92,94	93,68	93,58
Jumlah	67,69	68,66	66,63

Sumber : BPS Prov.NTB

TPAK yang berpendidikan maksimum SD cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK berpendidikan SLTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja tamatan SD yang tidak Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2013 35 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu melanjutkan sekolah cenderung akan masuk ke dunia kerja, dengan demikian akan menambah jumlah angkatan kerja. Mereka berusaha mencari pekerjaan dan bekerja apa saja karena tidak mempunyai keterampilan khusus yang dapat ditawarkan pada saat mencari pekerjaan. Namun, adanya program pemerintah wajib belajar 9 tahun mampu mengurangi TPAK berpendidikan SD yang semula 70,61 persen pada tahun 2008 turun menjadi 67,17 persen pada tahun 2010

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Perkembangan TPAK perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki. Perkembangan TPAK perempuan dipengaruhi peran ganda mereka dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak dan kemudian kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah besar.

Selain itu semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan di berbagai bidang akan diikuti oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

TPAK yang berpendidikan maksimum SD cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK berpendidikan SLTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja tamatan SD yang tidak Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2013 35 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu melanjutkan sekolah cenderung akan masuk ke dunia kerja, dengan demikian akan menambah jumlah angkatan kerja. Mereka berusaha mencari pekerjaan dan bekerja apa saja karena tidak mempunyai keterampilan khusus yang dapat ditawarkan pada saat mencari pekerjaan. Namun, adanya program pemerintah wajib belajar 9 tahun mampu mengurangi TPAK berpendidikan SD yang semula 70,61 persen pada tahun 2008 turun menjadi 67,17 persen pada tahun 2010

5.2. Saran

Disarankan kepada pada tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia hendaknya komitmen terhadap pekerjaan yang dialami, dan setiap TPAK cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan. TPAK Indonesia berpendidikan minimal SD cenderung lebih banyak terutama TPAK perempuan, hendaknya kepada TPAK perempuan harus berpacu didalam mengejar dunia pendidikan karena di aman era teknologi seperti sekarang ini sangat terlambat jauh TPAK Indonesia umunya masalah pendidikan disbanding Negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Provinsi, *Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 – 2013*

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Kerjasama Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011*

Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 – 2013 Diterbitkan oleh : Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Website : <http://www.pusatptk.depnakertrans.go.id>

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik* Tahun 2013

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB 72/11/52/Th. VII, 6 November-2013

Penduduk, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi/, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2013

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2013

Trend Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011

Perda N0.3 Tahun 2013

Buku Angkatan- [http:// www.com](http://www.com), diakses pada tanggal 28 Marat 2014

PTK, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (28 Marat 2012)

Website: [http:// www.tnp2k.wapresri.go.id](http://www.tnp2k.wapresri.go.id), diakses pada tanggal 29 Marat 2014

Website: [http:// www.tenagakerja.go.id](http://www.tenagakerja.go.id) di akses pada tanggal 2 Februari 2014

Website: [www.tenagakerjantransmigrasi go.id](http://www.tenagakerjantransmigrasi.go.id) diakses pada tanggal 10 Februari 2014